



ANALISIS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS

Muhammad Faisal ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Desember 2012
Disetujui Januari 2013
Dipublikasikan Februari
2013

Keywords:
Fraud; Government
Sector; Perception

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintahan Kabupaten Kudus sejumlah 118. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat analisis *smartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kepatuhan sistem pengendalian intern dengan *fraud* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian akan gaji dengan *fraud* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dengan *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan dengan *fraud* di sektor pemerintahan.

Abstract

This study aimed to explore the perceptions of employees in government agencies regarding the likelihood of fraud in the government sector and the factors that mempengaruhinya. Teknik sampling using convenience sampling. The samples in this study were employees of the District government Kudus Regency amount 118. Data collection using questionnaires. Data analysis in this study using a model full analysis Structural Equation Modeling (SEM) with smartPLS analysis tools. The results showed that there is a negative effect of the compliance of the internal control system with fraud in the government sector, there is no influence of conformity shall pay to the fraud in the government sector, there is no influence of the culture of the organization with fraud in the government sector, there is a positive effect between unethical behavior with fraud in the government sector, there is a negative effect between leadership styles with fraud in the government sector.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Menurut Razaee dalam Rozmita Dewi YR dan R. Nelly Nur Apandi (2010), *Fraud* adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerak putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2011 setidaknya ada 436 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Dari jumlah kasus itu, terdapat 1.053 tersangka dengan potensi kerugian negara Rp 2,169 triliun. Menurut peneliti Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun, dibandingkan tren penegakan hukum tahun sebelumnya terjadi penurunan angka meski tak signifikan. Jumlah kasus korupsi yang ditangani pada 2010 sebanyak 448 kasus dengan jumlah tersangka 1.157 orang dan potensi kerugian negara Rp 3,7 triliun. (Sumber : www.suaramerdeka.com, 06 Februari 2012)

Di tingkat Jawa Tengah (Jateng), Kudus dalam soal korupsi menempati urutan ke 9 pada tahun 2008, dan ke 10 pada tahun 2009 dari jumlah tindak pidana korupsi yang ada. Karena itu pemerintah minta peran serta masyarakat ditingkatkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada. Selain itu Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana normalisasi Kali Gelis dari APBD 2008 senilai Rp 978,7 juta.

Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Opportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran. Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, opportunity, dan rasionalitas sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum.

Pada penelitian Wilopo (2006), Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif ter-

hadap *fraud*, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*. Pada penelitian Wilopo (2008), sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Dalam penelitian Sulistiyowati (2007), kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, dan kultur organisasi terdapat pengaruh negatif terhadap *fraud*. Rae dan Subramaniam (2008), kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Pengembangan Hipotesis Sistem Pengendalian Internal

Dalam penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian lain Wilopo (2008) menunjukkan bahwa secara partial pengendalian intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi *fraud*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*), dengan didukung pernyataan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan, dan semakin tinggi kepatuhan sistem pengendalian intern maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan.

H_1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Gaya Kepemimpinan

Menurut COSO (2004), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasi, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008), bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya kepemimpinan terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan semakin

rendah tingkat terjadinya *fraud* dalam organisasi tersebut.

H_2 : Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Kesesuaian Kompensasi

Pada penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Terdapat persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepuasan gaji juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi.

H_3 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Perilaku Tidak Etis

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Menurut CIMA (2002) dalam Wilopo (2008) berpendapat bahwa budaya perusahaan dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hasil penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Wilopo (2008) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) tetapi tidak signifikan.

H_4 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Kultur Organisasi

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), mengatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai

sense of belonging (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

H_5 : Kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Komitmen Organisasi

Pada penelitian yang dilakukan oleh Valentine et al (2002), menemukan bahwa lingkungan etis perusahaan secara positif dan signifikan berhubungan dengan komitmen organisatoris. Komitmen organisatoris sendiri secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal. didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008) berargumentasi pada bahwa disuatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima dan menemukan adanya pengaruh antara lingkungan etis dan prosedur pengendalian internal yang memperkuat terjadinya *fraud*

H_6 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

Penegakan Hukum

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak memahaminya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat.

H_7 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Design Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data tersebut menggu-

nakan kuesioner. Data yang terkumpul diolah menggunakan alat analisis SmartPLS 2.0, untuk menentukan hasil dari pengujian hipotesis yang telah ditentukan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap (PNS) yang bekerja di Dinas Kabupaten Kudus. Menurut Arikunto (2002), sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sample*. Dari jumlah 12 dinas yang terdapat di Kabupaten Kudus hanya 7 dinas yang memberi ijin penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang dilakukan dari penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan – pertanyaan dengan diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan agar mempermudah responden dalam menjawab. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, dan (5) Sangat tidak setuju.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Fraud dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang merugikan orang lain dalam menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan sengaja menyajikan fakta yang tidak benar demi keuntungan pribadi. Lebih sederhananya, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal yang dimaksud seperti berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri.

Variabel Independen

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran ini memiliki lima item pertanyaan yang dikembangkan dari unsur-unsur pengendalian internal (COSO, 2004).

Young (dalam Kartono, 2003) mengatakan bahwa kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan peneri-

maan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Di dalam kepegawaian, hadiah yang berupa uang, merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka terhadap pekerjaan.

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Meski sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya yang berkaitan dengan informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi yang tersedia bagi pasar (Hendriksen, 1992 dalam Wilopo, 2006).

Kultur organisasi merupakan norma, nilai dan konsep dasar yang dianut oleh anggota organisasi kepada pemimpin yang dapat mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi.

Menurut Steers (1985), komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2008).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, dan nilai standar deviasi.

Dari statistik deskriptif pada Tabel 1 tampaklah bahasanya semua variabel berada pada nilai rata-rata yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari salah satu variabel yaitu variabel sistem pengendalian internal yang merupakan hasil olahan variabel SPI dari 5 pertanyaan yang valid dari

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	118	10,00	25,00	20,7288	3,49765
GK	118	7,00	25,00	18,2373	4,9436
KK	118	5,00	24,00	15,9576	4,0412
PTE	118	5,00	19,00	8,7881	2,8189
KUR	118	8,00	25,00	18,8644	3,4416
KOR	118	10,00	25,00	18,2119	3,5176
PH	118	10,00	25,00	18,5932	3,1845
FRAUD	118	10,00	36,00	20,1949	6,6168
Valid N (listwise)	118				

Sumber : Data yang diolah, 2012

Tabel 2. Uji Hipotesis

	Path coefficients					Hasil
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))	
SPI ->FRAUD	-0,292304	-0,300559	0,0936	0,0936	3,122911	Diterima
GK ->FRAUD	-0,180822	-0,18149	0,075719	0,075719	2,388055	Diterima
KK ->FRAUD	-0,056251	-0,051779	0,084469	0,084469	0,665938	Ditolak
PTE ->FRAUD	0,150994	0,156466	0,072138	0,072138	2,093122	Diterima
KUR ->FRAUD	-0,040464	-0,039898	0,06394	0,06394	0,632849	Ditolak
KOR ->FRAUD	-0,221552	-0,22684	0,109494	0,109494	2,023421	Diterima
PH ->FRAUD	-0,250645	-0,242796	0,084692	0,084692	2,959485	Diterima

Sumber : Data yang diolah, 2012

118 responden yang menghasilkan total jawaban minimum responden sebesar 10, total jawaban maksimum sebesar 25 dan rata-rata jawaban responden sebesar 20,728.

Uji Hipotesis

Berdasarkan uji path coefficient pada Tabel 2 didapatkan sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, perilaku tidak etis, komitmen organisasi, penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* karena dari nilai *t-statistic* signifikan pada $p < 0.05$ (diatas 1,658). Sedangkan kesesuaian kompensasi dan kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* karena nilai *t-statistic* berada dibawah 1,658.

Pembahasan

Terdapat pengaruh negatif antara Sistem

Pengendalian Intern (SPI) terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan. Dilihat dari nilai koefisien parameter sebesar -0,292 dan nilai *t-statistic* sebesar 3,122 signifikan pada ($p < 0.05$). Hal tersebut dikarenakan instansi sektor pemerintahan Kabupaten Kudus memiliki lingkungan pengendalian yang efektif berupa pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas, penaksiran resiko yang baik berupa kelengkapan bukti pendukung transaksi, aktivitas pengendalian yang baik berupa peraturan dan kebijakan instansi, informasi dan komunikasi yang baik berupa Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan sistem pengendalian internal instansi. Sistem Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntan-

si (Smith *et al.*, 1997 dalam Wilopo 2006). Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo 2006 dan Thooyibatun 2009.

Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *frauddi* sektor pemerintahan. Karena koefisien parameter mempunyai nilai koefisien parameter sebesar -0,180 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,388 (signifikan pada $p < 0.05$). Hal tersebut disebabkan para pemimpin instansi pemerintahan Kabupaten Kudus memiliki relasi yang baik dengan bawahannya, pemimpin instansi menguasai pembagian struktur tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai, dan pemimpin instansi memiliki posisi kekuatan sehingga arah dan tujuan organisasi tercapai. Suatu tekanan (*Pressure*) akan membuat pegawai cenderung melakukan kecurangan (*Fraud*), entah itu faktor tekanan keuangan yang berakibat atau masalah non keuangan yang berkaitan dengan faktor tekanan dari pekerjaan itu sendiri yaitu dari kepemimpinan seorang atasan, tekanan dari pemimpin akan membuat seorang pegawai akan bertindak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpinnya. Fenomena tersebut memicu terjadinya kecurangan (*Fraud*) dalam suatu instansi.

Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *Frauddi* sektor pemerintahan. Hal itu dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 0,665 berada dibawah nilai kritis 1,65882. Hal tersebut disebabkan karena tujuan utama para aparatur pemerintah bekerja adalah melayani masyarakat, meskipun mereka mengakui bahwa mereka rata – rata kurang puas dengan gajinya. Selain itu mereka juga memahami bahwa aturan gaji pokok untuk PNS sangat dipengaruhi oleh golongan dan lama masa kerja. Mereka menyadari sepenuhnya semua kewenangan yang berkaitan dengan penentuan gaji pokok mutlak di tangan Pemerintah Pusat, seperti yang diatur PP No. 9 Tahun 2007 yang memperbaharui PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Bologna (1993) dalam Soepardi (2010) mengatakan salah satu penyebab *fraud* atau kecurangan adalah *Greed* atau keserakahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulistyowati 2007 dan Wilopo 2006.

Terdapat pengaruh positif antara Perilaku Tidak Etis (PTE) terhadap *frauddi* sektor pemerintahan. Dilihat dari nilai koefisien parameter sebesar 0,150 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,093 (signifikan pada $p < 0,05$). Hal tersebut disebabkan karena perilaku manajemen di instansi pemerintahan Kabupaten Kudus tidak menyalahgunakan kedudukan, tidak menyalahgunakan

sumber daya organisasi, manajemen di instansi Kabupaten Kudus tidak menyalahgunakan kekuasaan., langsung bertindak, dan tidak mengabaikan peraturan. CIMA (2002) dalam Wilopo (2006) berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wilopo 2006 yang menunjukkan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi terhadap *frauddi* sektor pemerintahan. Hal itu dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 0,632 berada dibawah nilai kritis 1,658. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari berupa rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Pengaruh terbesar dalam diri seorang individu berasal dari dalam diri individu tersebut (internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, seperti keserakahan, keinginan bergaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja. Hal tersebut merupakan pengaruh terbesar untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi terhadap *frauddi* sektor pemerintahan. Dilihat dari nilai koefisien parameter sebesar -0,221 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,023 (signifikan pada $p < 0,05$). karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral. Komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal (Rae and Subramaniam, 2008). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rae and Subramaniam (2008) dan Valentine et al (2002)

Terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap *frauddi* sektor pemerintahan. Dilihat dari nilai koefisien parameter sebesar -0,250 dan nilai *t-statistic* sebesar 2,959 (signifikan pada $p < 0,05$). Hal tersebut disebabkan para pejabat instansi pemerintahan Kabupaten Kudus cepat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan instansi, karena penanganan pelanggaran dalam instansi tersebut selesai tepat waktu. Keputusan kepala instansi mengenai putusan hukuman pelanggaran peraturan juga sesuai dengan

aturan yang berlaku. Para pegawai juga menaati peraturan yang ada di instansi tersebut.

PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh negatif antara sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan; dan tidak terdapat pengaruh antara kepuasan akan gaji dan kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih akurat seperti data wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Keempat. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- COSO. 2004. *Enterprise risk management – integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations*
- Cressey Donald R.1953. *Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith
- Dewi YR., Rozmita R, Nelly Nur Apandi. 2012. *Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif)*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin
- Ghozali, Imam.. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Kartini Kartono. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Langkun, Tama S. 2012. *PNS Tersangka Koruptor Terbanyak*. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/02/06/176165/PNS-Tersangka-Koruptor-Terbanyak>. (Diakses tanggal 22 November 2012, pukul 12.52)

Rae and Subramaniam.2008. *Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud*. *Managerial Auditing Journal* Vol. 23 No. 2, 2008 pp. 104-124.

Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. (Alih bahasa M Yamin). Jakarta: Erlangga.

Sulistyowati, Firma. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Thooyibatun. 2009. *Analysing The Influence Of Internal Control Compliance And Compensation System Against Unethical Behavior And Accounting Fraud Tendency (Studies at State University in East Java. Palembang : Simposium Nasional Akuntansi XII*.

Valentine, Sean et al. 2002. *Ethical context, organizational commitment, and person-organization fit*. *Journal of Business Ethics*. Vol. 41 No. 4, pp. 349-61.

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi IX.

Wilopo. 2008. *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan*. *Jurnal Ventura* Volume 11 no. 1 April 2008.

Yugo Hindarto, Stefanus. 2012. 2011, *PNS Paling Banyak Korupsi*. <http://news.okezone.com/read/2012/02/06/339/570287/2011-pns-paling-banyak-korupsi>. (diakses tanggal 21 November 2012, pukul 19.34)